

Persepsi Mahasiswa Aktivistis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya terhadap Keterlibatan Kiai pada Politik Praktis

Fitri Ilmilia Fuadah¹, Maya Mustika Kartika Sari²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: fitri.19063@mhs.unesa.ac.id¹, mayamustika@unesa.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai persepsi mahasiswa aktivis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya terhadap keterlibatan kiai pada politik praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keterlibatan kiai pada politik praktis yang mana keterlibatan kiai dalam politik praktis untuk memperjuangkan hak hak umat islam, Kiai familiar sebagai pemimpin, tidak adanya larangan peraturan mengenai kiai berpolitik, keterlibatan oknum kiai dalam tindak pidana korupsi harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, kepemimpinan seorang kiai dalam politik melalui kebijakannya mendorong moderasi beragama dan keterlibatan kiai dalam politik praktis dianggap sebagai alat mencapai kepentingan. Dalam memberikan persepsi menurut teori dari Stephen P. Robins terdapat faktor faktor yang mempengaruhinya seperti faktor dari pemersepsi atau individu, faktor dari situasi atau lingkungan dan faktor dari target atau sasaran

Kata kunci: Persepsi, Mahasiswa, Kiai, Politik Praktis

Abstract

This study aims to describe the perceptions of student activists at the Faculty of Social Sciences and Law, Surabaya State University towards the kiai's involvement in practical politics. The method used in this research is qualitative with descriptive design. Data collection was used with in-depth interviews and documentation techniques. The results of the study show that students' perceptions of the kiai's involvement in practical politics where the kiai's involvement in practical politics is to fight for the rights of Muslims, the kiai is familiar as a leader, there is no prohibition on regulations regarding the kiai in politics, the involvement of kiai in corruption must be dealt with in accordance with applicable law, leadership of a kiai in politics through his policies encourages religious moderation and students' he kiai's involvement in practical politics is seen as a means of achieving interests. In giving perception according to the theory of Stephen P. Robins there are factors that influence it such as factors from the perceiver or individual, factors from the situation or environment and factors from the target or target.

Keywords : Perception, Students, Kiai, Practical Politics

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki berbagai macam agama seperti islam, hindu, budha, Kristen, katolik dan konghucu namun mayoritas penduduk Indonesia ialah beragama islam. Seorang kiai yang memiliki posisi sentral dan memiliki peran sebagai decision maker atau penentu keputusan. Pada posisi sentral tersebut kiai mendapatkan

legitimasi dari masyarakat bahwa kiai merupakan sosok yang paling otoritatif dalam mengatasi segala masalah seperti masalah sosial, ekonomi bahkan politik. (Zaenal, Fanani. 2021:224-225). Maka dengan itulah kiai mendapatkan posisi tertinggi dalam tatanan masyarakat. Namun realitas kehidupan kiai saat ini sudah banyak terjadi perubahan seperti dengan adanya para kiai yang ikut serta terjun dalam politik praktis.

Politik praktis secara eksplisit yaitu segala tindakan perebutan kekuasaan yang berhubungan oleh dengan pemerintah dan berdampak pada masyarakat. (Sumarta, 2022:5). Politik praktis merupakan orang-orang yang terlibat pada kegiatan perebutan kekuasaan. Pada umumnya dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok. Pada implementasinya, politik praktis terjadi pada pesta demokrasi seperti pada pelaksanaan pemilihan umum.

Peran seorang kiai sering dikaitkan oleh aktor politik sebagai tim sukses dalam kampanye ke masyarakat. Bahkan tak sedikit dari para elite politik merasa kurang lengkap jika tidak melibatkan kiai atau ulama dalam kampanye politik nya. Seperti contohnya ialah di masa kampanye untuk menarik pendukung nya, para paslon (pasangan calon) datang ke tokoh agama untuk meminta doa serta dukungannya. Hal ini dilakukan karena posisi sentral dari seorang kiai yang dapat meningkatkan suara serta dukungan pada pasangan calon pemimpin tersebut. Menurut Khoirul Misyuniarto (2020:51) yaitu banyak masyarakat yang mempercayai petuah yang diucapkan kiai sehingga kiai memiliki daya pikat yang luar biasa, dengan adanya hal tersebut kiai dengan mudah menggabungkan dukungan atau massa di lingkungan masyarakat nya. Dengan melibatkan kiai dalam politik praktis, maka menjadi keuntungan tersendiri bagi partai politik dalam memenangkan suara pada pemilihan umum. Namun disisi lain hal ini dapat menyebabkan konflik perbedaan politik antara sesama santri pengikut kiai tersebut. Santri yang merupakan pengikut kiai dan selalu mengikuti perkataan hingga perbuatan kiai akan dianggap tidak patuh jika tidak mengikuti pilihan politik kiainya.

Bukti dari adanya kiai yang terlibat dalam politik yakni seperti KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia yang ke empat. Selain itu terpilihnya pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden di Indonesia (2019-2024) yang menjadi salah satu bukti dan sejarah baru di Indonesia karena untuk pertama kalinya seorang kiai duduk di kursi Republik Indonesia nomor dua. Selain itu di lingkup provinsi Jawa Timur sendiri, contoh nya ialah Drs. K.H. Saifullah Yusuf atau sering disebut oleh masyarakat Gus Ipul. Beliau saat ini menjabat sebagai wali kota Pasuruan bahkan beliau juga pernah menjabat sebagai wakil Gubernur Jawa Timur dari tahun 2009 hingga tahun 2019.

Dalam keikutsertaan kiai sebagai aktor politik tak jarang menghasilkan sebuah kemenangan khususnya di daerah yang merupakan mayoritas masyarakat beragama islam. Menurut Nur Fitri (2018:100) Pada masyarakat jawa, karisma kiai masih begitu kuat, sebagai bukti banyaknya struktur pemerintahannya di setiap desa hingga tingkat gubernur dipimpin oleh kiai ataupun tokoh agama islam. Hal tersebut menandai bahwa kiai telah berperan sebagai governing elite. Governing elite adalah istilah untuk orang yang memiliki jabatan dalam politik pemerintahan (Farisi dan Haryadi, 2017:4).

Dalam lingkungan masyarakat terdapat berbagai kelompok serta individu individu yang terbentuk. Salah satunya ialah mahasiswa. Mahasiswa merupakan kaum terdidik dan memiliki idealis tersendiri dalam melihat fenomena politik yang ada dalam masyarakat terkhususnya mahasiswa yang berasal dari rumpun ilmu sosial dan humaniora. Terdapat kategori dalam kelompok mahasiswa. Menurut Rohman (2015:317) menyebutkan terdapat dua kategori nya terdapat dalam kelompok mahasiswa yaitu mahasiswa non aktivis atau apatis dan mahasiswa aktivis. Mahasiswa non aktivis atau apatis ialah mahasiswa yang dalam lingkungan perkuliahan hanya terfokus pada perkuliahan biasa dan tidak aktif dalam kegiatan kampus. Sedangkan mahasiswa aktivis merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan lingkungan kampus serta tergabung dalam sebuah organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Dengan keaktifan mahasiswa aktivis dalam sebuah kegiatan maupun organisasi, mahasiswa aktivis berperan dalam politik Indonesia.

Maka dengan melihat latar belakang tersebut, mahasiswa aktivis ilmu sosial tidak asing lagi dengan fenomena yang ada dalam masyarakat khususnya pada kajian ilmu politik.

Dengan menanggapi fenomena serta realitas tersebut, persepsi mahasiswa aktivis yang berasal dari rumpun ilmu sosial dan humaniora menjadi menarik dalam memberikan pandangan terhadap kiai yang terlibat pada politik praktis. Mahasiswa aktivis merupakan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi, namun dalam fokus penelitian ini peneliti mengambil informan mahasiswa aktivis yang tergabung dalam organisasi internal di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya karena mahasiswa tersebut dianggap mengerti terkait fenomena politik dan melihat fenomena yang ada dari sudut pandang anak muda khususnya mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi negeri di kota Surabaya.

METODE

Pemilihan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini karena didasarkan pada pandangan, pendapat dari individu yakni mahasiswa aktivis terkait adanya fenomena banyaknya seorang kiai yang menjadi figur dari agama islam yang terlibat pada politik praktis. Fokus dalam penelitian ini adalah Pandangan Mahasiswa Aktivis, Pengalaman Mahasiswa Aktivis, Pengetahuan Mahasiswa Aktivis. Ketiga fokus tersebut akan disesuaikan menggunakan teori persepsi menurut Stephen P. Robins. Persepsi merupakan pandangan individu terhadap suatu hal berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman individu. Menurut teori persepsi Robins, persepsi seseorang dipengaruhi oleh ketiga faktor yakni faktor individu pemersepsi (*perceiver*), faktor pada target atau sasaran, dan faktor dalam situasi. Kemudian ketiga faktor tersebut melahirkan sebuah pandangan, pengalaman serta pengetahuan individu yang selanjutnya dalam hal ini menimbulkan persepsi mahasiswa aktivis terhadap keterlibatan kiai dalam politik praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan kiai dalam politik di Indonesia saat ini menjadi suatu hal yang tidak asing lagi. Dengan adanya fenomena tersebut menimbulkan pandangan serta persepsi yang beragam dari berbagai elemen salah satunya ialah mahasiswa aktivis. Peneliti membagi kategori menjadi 2 kategori dalam menentukan informan yakni kategori mahasiswa yang pernah menjadi santri dan mahasiswa yang tidak pernah menjadi santri. Dengan kategori tersebut, peneliti menentukan Sembilan informan mahasiswa aktivis yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (BEM FISH) Universitas Negeri Surabaya. Peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut mengacu pada indikator dari teori Stephen P. Robins.

Keterlibatan Kiai dalam politik Praktis untuk Memperjuangkan Hak-Hak Umat Islam

Keterlibatan kiai dalam politik dianggap untuk memperjuangkan hak hak umat islam karena seorang kiai yang terlibat dalam politik praktis membawa suatu kepentingan aspirasi aspirasi dari umat islam. Dalam hal ini disampaikan oleh pernyataan dari saudara Sutrisno selaku ketua BEM FISH, yakni:

“Memang lek aku melihat kiai harus berpolitik karena memang memperjuangkan aspirasi dari pesantren, dari organisasi organisasi yang di dalam nya ada kepentingan, yang mana kepentingan itu adalah kepentingan orang orang islam, dan apabila mereka tidak masuk politik akan sulit memperjuangkan itu, karena penentu pembuat kebijakan adalah orang orang politik.” (Wawancara 01/06/23)”

Berdasarkan pernyataan dari saudara Sutrisno, melihat bahwa seorang kiai sudah sepatutnya untuk terjun dalam dunia politik. Hal ini bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari orang islam dan apabila kiai tidak terlibat dalam politik maka kebijakan maupun peraturan yang mengatur tentang agama islam tidak dapat terealisasi dengan baik.

Kiai Familiar sebagai Pemimpin

Seorang kiai yang terlibat dalam politik praktis pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat karena latar belakang dari seorang kiai tersebut. Latar belakang menjadi seorang kiai yang dianggap paham akan agama. Sebagaimana pernyataan dari saudara Wulan selaku Wakil Kepala Departemen Ekonomi Kreatif BEM FISH yakni:

“Sepenglihatan saya figur seorang kiai bisa dibilang ideal digunakan sebagai pemimpin karena apabila seseorang yang paham akan agama bisa dibilang sudah selesai dengan urusan dunia sehingga keinginan untuk melakukan tindakan kejahatan ataupun misalnya korupsi bisa dibilang minim...” (Wawancara 08/06/23)

Berdasarkan pernyataan dari saudara Wulan bahwa figur dari seorang kiai apabila terlibat dalam politik praktis ialah ideal. Hal ini dikarenakan latar belakang seorang kiai yang merupakan orang yang paham akan agama menjadi sebuah pedoman bagi dirinya sehingga keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi sangat minim terjadi. Hal diperjelas kembali dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara Wulan yakni:

“...buktinya adalah kiai saya yang menjadi pengasuh LPI Bina Anak Sholeh Tuban yang menaungi KB-TK-SD-SMP BAS dan SMA Al Huda Boarding School Tuban yaitu KH Fathul Huda. Beliau merupakan seorang Kyai dan Santri yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tuban pada dua periode. Kesuksesan beliau dalam memimpin dibuktikan oleh banyak prestasi yang diperoleh salah satunya kemiskinan di Kabupaten Tuban menurun...” (Wawancara 08/06/23)

Berdasarkan pernyataan dari saudara Wulan bahwa ia melihat seorang kiai yakni KH Fathul Huda yang menjadi pemimpin dalam sekolah serta pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tuban selama dua periode. Dalam penglihatannya seorang kiai tersebut sukses menjadi pemimpin dalam politik

Tidak Adanya Larangan Peraturan mengenai Kiai Berpolitik

Pada peraturan yang terdapat dalam undang undang secara spesifik tidak menunjukkan bahwa adanya larangan bagi seorang kiai untuk tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh saudara Reyman selaku Kepala Departemen Kajian Aksi Strategis BEM FISH yaitu:

“Pandangan ku secara hak politik boleh secara hak warga negara boleh karena itu hak dia sebagai figure politik atau sebagai partisipan politik...” (Wawancara (05/05/23)

Berdasarkan penjelasan dari saudara Reyman menegaskan bahwa keterlibatan kiai dalam politik praktis merupakan sesuatu hal yang tidak dilarang dalam peraturan negara. Hal ini diperjelas dengan pernyataan oleh saudara Pitono yakni:

“Menurut saya keterlibatan kiai dalam politik diperbolehkan saja karena itu hak semua orang dan sudah dilindungi UU (Undang-undang)...” (Wawancara 07/06/23).

Berdasarkan pernyataan dari saudara Pitono menjelaskan bahwa keterlibatan kiai dalam politik diperbolehkan karena merupakan hak semua orang yang sudah dilindungi oleh undang undang.

Kiai Terlibat Tindak Pidana Korupsi Harus Ditindak Sesuai Hukum yang Berlaku

Fungsi kiai dalam masyarakat sebagai penjaga moral masyarakat namun dalam konteks kiai yang terlibat dalam politik praktis khususnya kiai sebagai aktor politik yang menjabat di jabatan struktural terdapat beberapa oknum tokoh kiai yang melakukan perbuatan menyimpang moral seperti melakukan tindak pidana korupsi. Keterlibatan dalam tindak pidana korupsi bergantung dari dalam diri masing masing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudari Dini yakni:

“Tanggapan saya terhadap hal itu sebenarnya bercermin dahulu bagaimana kiai tersebut, apa komitmen kiai tersebut untuk ikut politik. Tapi pada dasarnya korupsi itu sebenarnya tidak termasuk scenario kiai tersebut dalam mengikuti politik. Sebenarnya korupsi itu dapat terjadi dari beberapa faktor seperti dari kelompoknya. Jadi kembali lagi komitmen kiai tersebut seperti apa pada saat tergabung dalam politik. Tapi apapun itu korupsi tidak dibenarkan dan harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku jadi saya tidak setuju dengan hal itu.” (wawancara 12/05/23)

Melihat penjelasan dari saudara Dini bahwa seorang kiai yang terlibat dalam politik pada dasarnya bergantung pada setiap individu masing masing. Korupsi bukanlah hal yang diinginkan oleh kiai tersebut namun pada saat ia terpilih sebagai pejabat publik maka faktor faktor yang mempengaruhi seorang kiai melakukan tindak pidana korupsi itu muncul seperti

faktor dari kelompok nya. Namun jika terdapat keterlibatan kiai dalam korupsi maka seorang kiai tersebut dapat di tindak lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pejabat Kiai Mendorong Moderasi Beragama

Kiai yang terlibat dalam politik praktis serta menjabat dalam jabatan struktural yang menetapkan suatu kebijakan yang menurut mahasiswa aktivis memiliki arti tersendiri dalam mendorong moderasi beragama di Indonesia. Yang mana Indonesia merupakan negara dengan penduduk memiliki keberagaman dalam memeluk agama. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan oleh saudara Dini yakni:

“Kalau dari saya di pemerintahan saat ini belum ada tapi kalau yang dulu itu pak Gusdur itu ya, beliau menanamkan benar benar sikap toleransi dan beliau juga yang mengesahkan agama konghucu, jadi Menganggap agama khonghucu ini ada di Indonesia. Itu kebijakan yang menurut saya bagus banget.” (wawancara 12/05/23)

Pernyataan dari Dini tersebut menjelaskan bahwa di masa kepemimpinan Gusdur terdapat suatu kebijakan yang berkesan yakni penanaman sikap toleransi. Salah satu contohnya ialah Gusdur yang mengesahkan agama khonghucu di Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap sangat bagus karena dapat meningkatkan toleransi umat beragama di Indonesia.

Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis sebagai Alat Mencapai Kepentingan

Keterlibatan kiai dalam politik praktis dikhawatirkan sebagai alat mencapai kepentingan suatu golongan tertentu yang akan berdampak pada marwah seorang kiai. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara Farros selaku wakil ketua BEM FISH mengenai pandangannya mengenai adanya keterlibatan kiai pada politik praktis

“Tidak setuju mbak, karena akan berdampak pada tindak perilaku kiai tersebut. Orang yang menjabat di jabatan struktural pasti bakal kena konflik kepentingan. Seharusnya jadi figure agama itu harus jauh dari konflik kepentingan yang seharusnya tidak beliau hadapi. Hal itu juga dapat merusak marwah sebagai kiai.” (wawancara 11/05/23)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saudara Farros tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan dia dengan melihat adanya keterlibatan kiai dalam politik praktis khususnya sebagai aktor politik yakni adanya kiai yang memiliki jabatan struktural mengakibatkan secara tidak langsung berdampak pada tindak perilaku kiai tersebut. Sosok kiai menjadi figure agama yang seharusnya jauh dari konflik kepentingan sehingga dengan keterlibatan kiai dalam politik praktis dikhawatirkan dapat merusak marwah nya sebagai seorang kiai.

Dengan adanya keterlibatan kiai dalam politik khususnya pada saat terlibat dalam pemilihan umum merupakan suatu perwujudan dari golongan tertentu.

Keterlibatan kiai dalam politik praktis dikhawatirkan berdampak pada tingkah perilaku kiai tersebut karena dianggap seseorang yang menjabat di jabatan struktural akan terlibat pada konflik kepentingan. Selain itu seorang kiai yang terlibat dalam politik praktis dikhawatirkan terlibat dalam politik transaksional seperti *money politic*. Kiai yang terlibat dalam politik praktis di anggap hanya sebagai alat oleh suatu golongan tertentu dengan mengatasnamakan agama untuk memperoleh kekuasaan. Khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum, seorang kiai yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum dianggap hanya sebagai alat dalam memperoleh suara dan memenangkan kiai tersebut dalam politik praktis. Hal ini dikarenakan seorang kiai memiliki representasi yang baik dan power dalam masyarakat khususnya dikalangan umat islam

Mahasiswa aktivis merupakan mahasiswa yang aktif dalam sebuah organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Mahasiswa aktivis memiliki pandangan yang berasal dari pengalaman serta pengetahuannya terhadap keterlibatan kiai dalam politik praktis. Dalam memberikan persepsinya mengenai keterlibatan kiai dalam politik praktis di Indonesia, mahasiswa aktivis dipengaruhi oleh tiga hal menurut teori persepsi oleh Stephen P. Robins yakni berasal dari individu pemersepsi, situasi, dan target atau sasaran.

Persepsi berasal dari Individu Pemersepsi

Pertama, berdasarkan persepsi yang berasal dari individu pemersepsi, mahasiswa aktivis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya memberikan pandangannya yang berasal dari pengetahuan dan pengalamannya. Pengetahuan mahasiswa aktivis yakni melihat fenomena politik di Indonesia saat ini seperti banyaknya tokoh agama yang dalam hal ini kiai terlibat pada politik praktis. Selain itu pengalaman mahasiswa seperti terlibat dalam organisasi intra maupun ekstra kampus serta pengalaman mahasiswa aktivis pernah menjadi seorang santri. Dari pengetahuan dan pengalaman tersebut maka dapat melahirkan persepsi mahasiswa aktivis terhadap keterlibatan kiai dalam politik praktis yang berasal dari individu pemersepsi.

Pengetahuan dan pengalaman mahasiswa aktivis dapat terbentuk karena beragam faktor, salah satunya yakni organisasi yang diikutinya yang mana biasa disebut sebagai organisasi ekstra kampus atau disingkat ormek. Adanya perbedaan tersebut ternyata berpengaruh dalam pembentukan persepsi mahasiswa anggotanya mengenai keterlibatan kiai dalam berpolitik praktis. Mahasiswa aktivis yang berasal dari organisasi ekstra kampus bernuansa agama seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dalam menyatakan persepinya memberikan pandangan yang positif terhadap fenomena kiai yang terlibat politik praktis karena keterlibatan kiai dalam politik merupakan suatu hal yang harus terjadi sebagai penyalur aspirasi masyarakat khususnya umat Islam.

Selain itu keterlibatan kiai bukanlah suatu yang melanggar hukum maupun ketentuan dalam peraturan negara. Sedangkan mahasiswa aktivis yang berasal dari organisasi ekstra kampus nasionalis seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI mayoritas memberikan persepsi menolak atau negatif terhadap keterlibatan kiai pada politik praktis. Hal ini dikarenakan keterlibatannya dianggap kurang etis sebagai seorang figur agama dan dikhawatirkan seorang kiai hanya sebagai alat mencapai kepentingan suatu golongan atau kelompok tertentu.

Persepsi berasal dari Situasi

Berdasarkan persepsi yang berasal dari situasi, individu melihat fenomena yang ada secara berulang ulang dan kemudian dapat mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini, mahasiswa aktivis melihat tidak terdapat peraturan dalam undang undang secara spesifik yang mengatur tidak diperbolehkannya kiai terlibat dalam politik praktis. Hal ini dikarenakan kiai merupakan warga negara sehingga keterlibatan kiai tersebut dalam politik merupakan hak warga negara. Selanjutnya dengan fenomena banyaknya keterlibatan kiai dalam politik praktis mengakibatkan banyaknya oknum seorang kiai yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Keterlibatan kiai dalam tindak pidana korupsi berdasarkan pada berbagai faktor yakni faktor dari individu kiai tersebut atau dapat berasal dari faktor lingkungan sekitarnya atau kelompoknya.

Dalam hal ini bergantung pada komitmen serta moral seorang kiai masing masing dalam menanggapi. Apabila seorang kiai tersebut terlibat tindak pidana korupsi maka dapat mencoreng nama agama serta menggeser hakikat politik yang sebenarnya. Maka kiai yang terlibat tindak pidana korupsi harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melihat latar belakang kiai tersebut. Meskipun dalam pandangan mahasiswa aktivis bahwa seorang kiai yang terlibat dalam politik memiliki resiko bertabrakan antara hati nurani dengan kepentingan-kepentingan kelompok. Sehingga hal ini dianggap sebuah resiko apabila terlibat dalam ranah politik praktis.

Dalam situasi menurut Stephen P. Robins dapat berasal dari lingkungan atau latar belakang individu tersebut. Mahasiswa aktivis dalam hal ini pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum memiliki latar belakang organisasi eksternal yang berbeda. Selain itu terdapat mahasiswa yang memiliki latar belakang pernah menjadi santri dan tidak pernah menjadi seorang santri. Dalam memberikan persepsi, latar belakang seorang individu sangat berpengaruh terhadap pandangannya. Seorang mahasiswa aktivis yang memiliki latar belakang pernah menjadi santri memberikan persepsi positif terhadap keterlibatan kiai dalam politik praktis. Namun terdapat juga individu yang pernah menjadi santri

namun memberikan persepsi yang negatif, hal ini salah satunya dikarenakan faktor dari organisasi eksternal yang dia ikuti yang mengarah pada organisasi eksternal nasionalis. Selanjutnya mahasiswa aktivis yang memiliki latar belakang tidak pernah menjadi seorang santri memberikan persepsi yang negatif cenderung paradoks yakni dimana dia memberikan persepsi negatif namun disisi lain juga memberikan pandangan positif terhadap kiai terlibat dalam politik praktis.

Persepsi berasal dari target pemersepsi

Berdasarkan persepsi dari target pemersepsi yang dalam hal ini ialah kiai yang terlibat dalam politik praktis dapat mempengaruhi pemikiran, pengalaman dan pengetahuan dari mahasiswa aktivis. Salah satu kiai yang terlibat dalam politik praktis yang dalam keterlibatannya memiliki kesan positif yakni KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Gusdur merupakan sosok kiai yang pernah menjabat dalam pemerintahan yakni sebagai presiden keempat di Indonesia dan merupakan sosok yang cerdas salah satunya dalam mengimplementasikan nilai nilai toleransi pada masyarakat Indonesia. Selama menjabat sebagai presiden, Gusdur membuat sebuah kebijakan berpengaruh dalam masyarakat Indonesia yakni meresmikan agama khonghucu sebagai agama resmi di Indonesia dan mengesahkan hari raya Imlek.

SIMPULAN

Mahasiswa aktivis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang merupakan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (BEM FISH) memberikan persepsinya mengenai keterlibatan kiai dalam politik praktis, persepsi setuju yang diberikan meliputi (1) Seorang kiai terlibat dalam politik praktis untuk memperjuangkan hak-hak umat islam; (2) kiai familiar sebagai pemimpin; (3) Tidak adanya larangan peraturan mengenai kiai berpolitik; (4) Keterlibatan oknum kiai dalam tindak pidana korupsi harus ditindak sesuai hukum yang berlaku; (5) Pejabat kiai mendorong moderasi beragama. Sedangkan mahasiswa aktivis yang memiliki persepsi tidak setuju yakni keterlibatan kiai dalam politik praktis sebagai alat mencapai kepentingan.

Latar belakang mahasiswa aktivis yang pernah menjadi seorang santri dan keikutsertaan dalam organisasi eksternal kampus memberikan pengaruh terhadap mahasiswa dalam memberikan persepsi setuju maupun tidak setuju terhadap keterlibatan kiai pada politik praktis. Namun dalam memberikan persepsi tidak setuju, mereka juga memberikan persepsi setuju sehingga membuat persepsi yang mereka berikan cenderung tidak memiliki persepsi yang tegas. Dengan menggambarkan pemikiran tersebut, mahasiswa aktivis memiliki pandangan paradoks yang seolah-olah memiliki pandangan yang bertentangan namun disisi lain mengandung kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Sri. 2019. "Persepsi Mahasiswa dalam Pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi". *Jurnal At-Tadbir STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang*. Vol 3 (01): hal 59-77.
- Bawamenewi, Adrianus. 2019. "Implementasi Hak Politik Warga Negara". *Jurnal Warta Edisi : 61*. hal 43-56
- Budiana & Hasan. 2019. "Analisis Partisipasi Mahasiswa dalam Gerakan Politik Praktis (Studi Kasus Keterlibatan Mahasiswa Unsyiah Pada Liga Mahasiswa Nasdem Aceh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol 4 (3): hal 1-11.
- Cahyono, Habib. 2019. "Persepsi Mahasiswa di Masyarakat". *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudi*. Vol 1 (01): hal 33-43.
- Demmy & Fathul. 2018. "Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 77-83
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.

- Fanani, Zaenal. 2021. "Kekuasaan dan Otoritas Kepemimpinan Kyai dalam Proses Pengambilan Keputusan di Ponpes PPAI Daarussalam Wagir Malang". *Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan*. Vol 5 (02): hal 221-230.
- Farisi & Haryadi. 2017. "Sirkulasi Elit Politik Lokal Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Jambi". *Jurnal JISIP-UNJA*. Vol 1 (01): hal 1-16.
- Fitri, Nur. 2018. "Transisi Demokrasi dan Mobilitas Vertikal Kyai: Potret Peran Kyai sebagai Governing Elite". *Al Hikmah Jurnal Keislaman*. Vol 8 (1): hal 99-111.
- Khalik, NP 2018. "Pengaruh komunikasi tim sukses partai politik terhadap hasil kemenangan pemilihan kepala daerah (studi tim sukses dpac pdi-p kecamatan tombulu kabupaten minahasa)". *Ejournal UNSRAT*
- Mahadi, Ujang. 2015. "Komunikasi politik kiai pada kampanye pemilu". *ADDIN*. Vol 9 (2): hal 229-252.
- Misyuniarto, Khoiril. 2020. "Komunikasi Politik Kiai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 10 (1): hal 49-62.
- Mukari, dkk. 2022. "Kiai sebagai Kekuatan Politik dalam Pemilihan Presiden 2019 di Jawa Timur". *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*. Vol 05 (1): hal 15-33.
- Mutaqin, Mumu. 2020. "Eksistensi Kiai terhadap Kegiatan Keagamaan di Cigoong Utara Kecamatan Cikukur Kab. Lebak". *Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah : The Indonesian Journal of Islamic Studies*. Vol 8 (01): hal 23-88.
- Ngangi, Charles. 2011. "Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial". *ASE*. Vol 7 (02): hal 1-4.
- Pakaya, Usman. 2009. "Feodalisme dan Konsepsi Hegemoni dalam Kultur Sosial (Sebuah Kajian Komparatif)". *Jurnal Pelangi Ilmu Edisi Khusus*. Vol 2 (04): hal 112-120.
- Purnomo, Hadi. 2010. "Kiai dan Transformasi Sosial-Dinamika Kiai dalam Masyarakat". *Absolute Media*.
- Putri, dkk. 2020. "Persepsi Mahasiswa yang kuliah di Surabaya tentang Keterlibatan Artis dalam Pilihan Legislatif 2019 Daerah Pilihan Jawa Timur". *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. Vol 5 (01): hal 22-33.
- Rahmah, Syifaur. 2021. "Personal Branding Ganjar Pranowo untuk Membangun Komunikasi Politik di Media Sosial Instagram". *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 5 (01): hal 94-101.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rizki, dkk. 2022. "Strategi Pemenangan Tim Sukses dalam Pemilihan Kepala Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon 2019-2024". *Jurnal Network Media*. Vol 5 (01): hal 88-99.
- Rohman. 2015. Perbedaan Aktualisasi Diri Mahasiswa Ditinjau dari Kategori Aktifis dan Non-Aktifis. *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan: Universitas Muhammadiyah Malang*. hal 315-322.
- Rosi, Fathor. 2020. "Gerakan Politik Kiai dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah dan Politik Kiai pada Momentum Pemilu". *At Turost: Journal of Islamic Studies*. Vol 7 (02): hal 233-255.
- Sari, Nurpita. 2020. "Kiai dan Politik: Analisis Peran Kiai Kecamatan SP Padang dalam Pilkada OKI tahun 2018". *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*. Vol 1 (03): hal 208-225.
- Shambodo, Yoedo. 2020. "Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang UGM terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja TV". *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. Vol 1 (02): hal 98-110.
- Soemanagara, Rizky. 2006. Persepsi Peran, Konsistensi Peran dan Kinerja. *Jurnal Stialanbandung*. 270-287.
- Sri, dkk. 2014. Pergeseran Identitas Mahasiswa: Korelasi Religiusitas dan Perilaku Mahasiswa IAIN Mataram. *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol 10 (02): hal 35-62.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:ALFABETA.
- Sulaiman, Aimie. 2016. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger". *Jurnal Society*. Vol 6 (01): hal 15-22.

- Sumarta. 2022. "NU antara Politik Praktis dan Khittah". *Khulasah: Islamic Studies Journal*. Vol 4 (01): hal 1-13.
- Surbakti Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryani dkk. 2016. "Politik Identitas dan Nasionalisme Kebangsaan (Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Baru)".
- Sutopo. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Buku Ajar Perilaku Organisasi*. Deepublish: Universitas Negeri Gorontalo.
- Walgito, Bimo. 1986. *Psikologi Umum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Wiguna, dkk. 2019. "Regulasi Diri pada Mahasiswa Berprestasi". *Jurnal Paedagogie STKIP Muhammadiyah Sampit*. Vol 7 (02): hal 65-71.